

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

2. Bagi Hakim, dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, wajib untuk memberikan solusi atau perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikata*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Abdurrahman. 1985. *Tabaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung. Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Laksbang Mediatma. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana. Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Press. Depok.
- Aminuddin Salle. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. AS Publishing. Makassar.
- A.P. Perlindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan IV). 1991. *Beberapa Konsep tentang Hak-Hak Atas Tanah*. Majalah CSIS. Tahun XX Nomor 2. Maret-April. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Cetakan ke 8 Mandar Maju. Bandung.
- Arie S. Hutagulung dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bachtiar Efendi. 1982. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Alumni. Bandung.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Boedi Harsono. 1971. *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jambatan. Djakarta. 1971.

- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya)*. Jilid 1. Hukum Tanah Nasional. Djambatan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany. 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Herlien Budiono. 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (selanjutnya disebut Herlien Budiono I)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung.
- Maria. S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta. Kompas.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Revka Petra Media. Surabaya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.

- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Ronal Saija, Roger F.X. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish. Yogyakarta.
- R Van Dijk.1979. Diterjemahkan A. Soehardi.*Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. SinarGrafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo.2000. *IlmuHukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010.*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. 1976. *Hukum Perjanjian..* PT Inermasa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter massa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Inter massa, Cet.XXVIII.
- \_\_\_\_\_.2002. *Hukum Perjanjian*. cetakan 20. PT. Inter massa. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika-Universitas Terbuka. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1990. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (selanjutnya disebut Urip Santoso I). Kencana. Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro. 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung, Sumur

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### C. Jurnal

- Ardiansyah Zulhadji. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016* Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 4.
- Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2.
- Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri. 2018. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik*". Vol 15 No. 4.
- Ketut Dezy Ari Utami. 2005. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan*. Jurnal Arena Hukum, Vol. 7 No.2.
- Muhammad Rustan . 2014. *The essence of Social Function of Property right of the Land in Perspective Justice and Utility*, Journal of Research in Humanities and Social Science Vol.2.
- Naomi Elvienne Yanto . 2018. *Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Sebagai Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak atas Tanah (Studi Kasus Pembatalan Sertifikat Nomor 2690 / Kebun Kelapa)* . Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1.
- Randang S. Ivan. 2016. *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Jurnal Lex Privatum. Volume 4, No 1.
- Reynaldi C.N Moomin. 2017. *Penerapan Hukum Hak atas Tanah Melalui Pewarisan Menurut Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* LexPrivatum, Vol 5 No. 3.
- Rocky Marciano Ambar, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti. 2017. *Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai syarat batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Jurnal Diversi. Vol 3. No.1.
- Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2.

Yelina Rachma Pranamawati. 2018. *Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Risalah Lelangnya Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Oleh Pengadilan*. Jurnal Reportorium. Vol 5 no. 1.

#### **D. Website**

Diakses dari <http://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/hak.html> dikutip pada tanggal 17 November 2019 pukul 20.00 WITA.

Diakses dari <http://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/hak.html> dikutip pada tanggal 28 September 2019 pukul 20.15 WITA.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian>, diakses pada 02 Februari 2020, Pukul 16.35 WITA.